



## General Overview

Entri FHNRW 1-15 Mei adalah 24 entri berita. Berita kesehatan terdiri dari 10 berita, diantaranya mengenai BPJS “Membunuh” Warga Miskin, NTT Tergolong Daerah Endemik Malaria, dan Puluhan Pendorong Darah Terdeteksi Positif HIV/AIDS. Berita pangan, mengenai Ekonomi Penyebab Rentan Gizi Buruk, dan Bulog Ende tidak beli berani petani. Berita risiko, diantaranya tentang warga Warga Desa Ondorea Barat (Ende) Minta Bronjong, dan Jalan Negara Ruteng-Borong Tertutup Longsor. Berita tentang air, diantaranya mengenai kesulitan air bersih yang terjadi di Kabupaten Sikka dan Alor.

Isu Terseleksi	1-15 Mei	16-31 Mei
Kesehatan (Health)	1	10
Pangan & Gizi (Food & Nutrition)	2	2
Risiko (Risk)	2	5
Air (Water)	5	7
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>24</b>

IRGSC NTT Research focus adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan penelitian tentang NTT yang mutakhir yang dikombinasikan dengan berita dari tiga media harian utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi, risiko, dan air. Terkait rangkuman berita di bawah ini, diharapkan agar pembaca melakukan validasi dari kliping berita yang dimaksudkan [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 17].

## Contents

KESEHATAN .....	2
1. BPJS “Membunuh” Warga Miskin.....	2
2. NTT Tergolong Daerah Endemik Malaria .....	3
3. Puluhan Pendorong Darah Terdeteksi Positif HIV/AIDS .....	4
4. Kasus Gigitan HPR Tinggi.....	5
5. RSUD TC Hillers Sering Kehabisan Darah .....	5
6. Poskesdes Nanga Jadi Hunian Kambing.....	6
7. Masyarakat Gurung Minta Pustu .....	6
8. Pasien Beli Obat di Apotek Swasta .....	7

9. Pasien Poli Penyakit Dalam Membludak.....	8
10. Sampah Kotori RSUD Kota .....	8
PANGAN & NUTRISI.....	9
1. Ekonomi Penyebab Rentan Gizi Buruk.....	9
2. Bulog Ende Tidak Beli Berani Petani .....	10
RISIKO.....	11
1. Warga Desa Ondorea Barat Minta Bronjong .....	11
2. Lalu Lintas Macet 2,5 Jam. Jalan Negara Ruteng-Borong Tertutup Longsor .....	11
3. Kapal Nelayan Tenggelam di Pukuafu.....	12
4. Jalan Nangapanda-Maukaro Rusak.....	12
5. Ruas Jalan Ndona-Nuabosi Memprihatinkan.....	13
AIR.....	13
1. Debit Air di Magepanda Menurun Drastis .....	13
2. PDAM Kota Ancam Bongkar Pipa di Tamnos .....	14
3. Warga Tabolang Konsumsi Air Hujan.....	15
4. Tiga Desa di Kangae Kesulitan Air Bersih .....	15
5. Warga Dobo Konsumsi Air Hujan.....	16
6. PDAM Cabut Meteran Air SMK 2 Soe .....	16
7. Rujab DPRD Kota Tunggak Bayar Air.....	17

## KESEHATAN

### 1. BPJS “Membunuh” Warga Miskin

Victory News: Selasa, 20 Mei 2014 (halaman 14)

Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) yang merupakan salah satu program kesehatan nasional yang telah diberlakukan selama ini, justru menuai kritik. Pelaksanaan BPJS sebagai pengganti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tersebut, tidak saja mempersulit masyarakat miskin, tetapi juga membunuh masyarakat miskin secara perlahan-lahan. Demikian penilaian Ketua DPRD Kabupaten Lembata Yohanes De Rosari saat memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang I sekaligus membuka masa persidangan II, tahun sidang 2014 di Gedung DPRD Kabupaten Lembata, Senin (20/5). Dia mengatakan, pemberlakuan BPJS, bukan membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan, namun justru mempersulit masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di

daerah. Meskipun pemberlakuan BPJS tersebut merupakan program nasional yang dilegalkan dengan undang-undang, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Sehingga persyaratan untuk memperoleh BPJS, tidak harus dibebankan kembali kepada masyarakat, yang rata-rata tingkat ekonominya di bawah standar. “Bagaimana mungkin, masyarakat setiap bulan dibebankan untuk membayar iuran Rp. 25 ribu. Regulasi ini, manusia yang buat, jadi kita bersama pemerintah daerah, harus mengambil sikap sesuai kondisi lokal yang ada. Kita akan lakukan rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Lembata untuk membahas soal BPJS ini,” tegasnya. De Rosari juga meminta Sekretaris Dewan untuk menjadwalkan rapat kerja bersama pemerintah pada Selasa (21/5) untuk membahas tentang pemberlakuan BPJS tersebut. Terpisah, Aloisius Making, warga Desa Jhontona, Kecamatan Ile Ape Timur kepada VN mengatakan, pemberlakuan BPJS tidak terlepas dari lemahnya sosialisasi dari BPJS terhadap masyarakat tidak mengetahui perubahan program dari Jamkesmas ke BPJS. Menurutnya, dalam program Jamkesmas sebelumnya, dikatakan akan berlaku seumur hidup. Namun dalam perjalanan, program Jamkesmas ini diganti dengan BPJS. Hal ini membangunkan masyarakat yang memiliki sumberdaya yang sangat minim. Kebingungan tentang pemberlakuan Jamkesmas dengan menggantikan BPJS ini, karena BPJS adalah asuransi kesehatan. “Bagi pemegang BPJS apakah setelah mengurus BPJS, memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin untuk melakukan pengobatan secara gratis,” ungkapnyanya. Hal-hal ini justru membingungkan masyarakat menengah ke bawah dalam penggunaan BPJS tersebut. Hal ini mencerminkan negara melepaskan tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat. Tidak heran kalau setiap pergantian rezim, pasti ada perubahan program. “Bagaimana bisa pengguna BPJS harus tiap bulannya dibebankan Rp. 25 ribu untuk masyarakat miskin. Sedangkan proses untuk mengurus BPJS juga sangat sulit. Sehingga banyak masyarakat yang pasif untuk mengurus BPJS ini. masih lebih baik kita gunakan Jamkesmas untuk berobat,” pungkas Making.

## 2. NTT Tergolong Daerah Endemik Malaria

Timor Express: Rabu, 21 mei 2014 (halaman 11)

Secara nasional ada lima provinsi di Indonesia, yang segera diakselerasikan pemberantasan malaria. Lima provinsi itu antara lain, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua serta Papua Barat. Dalam memperingati hari malaria sedunia, yang berlangsung 16 April 2014 di Jakarta, Menteri Kesehatan RI, memberi penghargaan kepada provinsi lain, yang berhasil memberantas penyakit malaria. Sedangkan provinsi NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara mendapat malaria Kit, sebagai upaya akselerasi pemberantasan penyakit malaria di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Theresia Sarlyn Ralo, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Selasa (20/5). Menurut dr

Theresia, upaya pemberantasan penyakit malaria, dibutuhkan perhatian lintas sektor, untuk terlibat dalam pemberantasan penyakit malaria. Karena hampir 22 Kabupaten/Kota di NTT, merupakan daerah endemik malaria. Upaya pemberantasan penyakit malaria di NTT bilangnya, mendapat dukungan dana dari Global Fund dan UNICEF. Meskipun UNICEF hanya memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Sikka, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Barat, tetapi Global Fund memberi dukungan dana kepada semua kabupaten kota di NTT, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT, melalui dana APBD NTT mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 205 juta untuk pelatihan mikroskop bagi tenaga mikroskopis yang tersebar di setiap puskesmas di NTT. Tahun ini sebutnya, Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi memberi bantuan kelambu untuk masyarakat di lima provinsi, yang tergolong wilayah endemik malaria. Khusus provinsi NTT mendapat bantuan lebih 1.514.469 unit kelambu yang bakal dibagikan kepada 15 kabupaten. Kabupaten yang mendapat bantuan kelambu diantaranya, Sumba Barat Daya sebanyak 155.475 kelambu, untuk 279.855 penduduk, Sumba Barat ada 64.113 untuk 121.488 penduduk, Sumba Tengah sebanyak 39.147 kelambu untuk 70.464 penduduk, Sumba Timur mendapat pembagian sebanyak 122.967 kelambu, untuk 234.642 penduduk, Rote Ndao mendapat pembagian kelambu sebanyak 67.037 untuk 124.838 penduduk. Selain itu, Kabupaten Belu mendapat 98.184 kelambu untuk 193.478 penduduk, Alor mendapat 107.460 kelambu untuk 182.464 penduduk, Lembata mendapat 65.830 kelambu untuk 232.605 penduduk. Selanjutnya, Sikka mendapat 133.496 kelambu untuk 311.683 penduduk, Kabupaten Ende mendapat 144.993 kelambu untuk 269.629 penduduk, Nagekeo mendapat 73.588 kelambu untuk 130.120 penduduk, Manggarai Barat mendapat 125.988 kelambu untuk 225.302 penduduk. Sabu Raijua mendapat 42.541 kelambu untuk 79.914 penduduk. Malaka mendapat 100.383 kelambu untuk 169.132 penduduk. "Total kelambu yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 1.514.469 unit, untuk 2.744.290 penduduk di NTT," pungkas dr. Theresia.

### **3. Puluhan Pendoror Darah Terdeteksi Positif HIV/AIDS**

Victory News: Senin, 26 Mei 2014 (halaman 15)

Sejak 2013 hingga 2014 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT berhasil mendeteksi 24 pendonor darah yang positif HIV/AIDS dan ribuan pendonor yang menderita penyakit hepatitis B. Hal ini diketahui setelah darah diperiksa melalui berbagai tahapan yang berjalan hampir mencapai 40 hari. Demikian diungkapkan Kepala Transfusi Darah PMI NTT Samson Ehe Teron di Kupang, belum lama ini. menurut Samson, pemeriksaan untuk mendeteksi darah yang positif HIV/AIDS membutuhkan waktu yang lama karena PMI belum memiliki alat canggih Nucleic Acid Testing (NAT). Berbeda dengan HIV/AIDS, justru hepatitis B akan cepat terdeteksi bahkan sebelum orang tersebut mendonorkan darahnya. Hal itu dapat

diketahui dari kondisi fisik dan pemeriksaan sehingga disarankan untuk tidak mendonorkan darahnya. Dia menyampaikan, pendonor yang terdeteksi menderita hepatitis B akan dihubungi oleh PMI secara pribadi untuk dicek darahnya kembali. Selanjutnya diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan pada layanan VCT di RSUD WZ Johannes, RS Bhayangkara, dan Yayasan Tanpa Batas untuk dicek kembali jumlah virus dalam darah serta diberi pendampingan dan terapi pengobatan untuk mencegah penularan. Samson juga menegaskan, darah yang terdeteksi HIV/AIDS dan hepatitis B tidak akan digunakan, tapi hanya disimpan untuk keperluan laboratorium dalam penelitian dan uji kebenaran dengan metode yang lebih tinggi. Pada bagian lain, samson juga menyampaikan bahwa stok darah golongan AB di tempat penyimpanan darah PMI NTT kini menipis, dan hanya tinggal sembilan kantong. Sedangkan trombosit darah AB kosong. Menurut dia, pihaknya kesulitan mendapatkan darah AB karena pendonornya sangat minim. Untuk mengantisipasi pasien yang membutuhkan darah AB, menurut Samson, PMI sudah mengantongi darah pendonor rutin sehingga bisa dihubungi agar membantu mendonor atau mencarikan pendonor darah AB.

#### **4. Kasus Gigitan HPR Tinggi**

Timor Express: Sabtu, 31 Mei 2014 (halaman 15)

Kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) selama tahun 2013 cukup tinggi, bahkan total secara keseluruhan mencapai ribuan kasus. Dari jumlah tersebut, tiga orang diantaranya meninggal dunia akibat positif mengidap virus rabies. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Emerensiana Reni Wahyuningsi kepada Timor Express, pekan kemarin. Emerensiana menjelaskan, kasus gigitan hewan penular rabies paling banyak terjadi di Puskesmas Wae Pena Kecamatan Soa jika dibandingkan dengan puskesmas lain. Hal ini menunjukkan jika populasi HPR di kecamatan tersebut tergolong paling tinggi. “Dari laporan yang masuk, tingkat gigitan paling tinggi selama tahun 2013 terjadi di Puskesmas Wae Pena Kecamatan Soa,” katanya. Dari jumlah tersebut, selama tahun 2013 sudah tiga orang yang meninggal dunia akibat positif rabies. Sedangkan selama tahun 2014 kasus gigitan masih terus meningkat dan sudah ada satu pasien yang dinyatakan suspek rabies.

#### **5. RSUD TC Hillers Sering Kehabisan Darah**

Pos Kupang: Senin, 19 Mei 2014 (halaman 18)

RSUD TC Hillers Maumere sering kehabisan stok darah. Akibatnya, pasien yang dilarikan ke UGD dan membutuhkan darah sering mengalami kesulitan, bahkan ada yang meninggal dunia. Selama ini keluarga pasien harus mengeluarkan biaya

transportasi untuk mencari frater-frater di Ledalero, Carmel, anggota Polres Sikka dan Kodim 1603 Sikka untuk membantu donor darah bagi pasien yang membutuhkan darah. Keluarga pasien harus mengeluarkan biaya untuk membeli kantong darah di rumah sakit pemerintah itu. menyikapi persoalan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebagai penanggung jawab menggelar workshop pembentukan relawan donor darah di Sikka, Sabtu (17/5) pagi. Workshop yang berlangsung di Aula Dinkes Sikka dihadiri pihak RSUD Maumere, PMI Sikka, Dinkes Sikka, mahasiswa dan tokoh masyarakat serta lembaga perbankan Maumere. Mereka sepakat mengatasi persoalan ketersediaan darah di RSUD Maumere secara bersama-sama. Dalam kesepakatan tersebut, manajemen RSUD Maumere harus menyiapkan bank darah dan PMI harus membentuk jaringan agar orang bisa menyumbang darah. Menurut data Dinkes Sikka, hingga saat ini ada lima orang ibu dan anak yang meninggal karena ketiadaan darah. Pada tahun 2013 hanya empat kasus, tapi pada tahun ini mulai mengalami peningkatan pada posisi Mei 2014.

#### **6. Poskesdes Nanga Jadi Hunian Kambing**

Pos Kupang: Senin, 19 Mei 2014 (halaman 18)

Pos kesehatan desa (poskesdes) Nanga di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang dibangun untuk melayani kesehatan masyarakat di Nanga, jadi hunian kambing. Poskesdes yang dibangun persis di belakang SDK Nanga dan Stasi Nanga mubazir belum ditempati petugas kesehatan. Poskesdes itu dibangun cukup megah di tengah pemukiman warga. Namun hingga kini petugas tidak pernah melaksanakan tugas. Hak ini dikeluhkan warga Nanga saat bertatap muka dengan Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera di Pulau Besar, Rabu (14/5). Warga mengeluhkan jika mau berobat warga harus mengeluarkan biaya cukup besar ke Parumaan dan Maumere. Warga mengatakan, jika berobat di Pustu Parumaan, warga harus mengeluarkan biaya Rp. 50 ribu dan ke Maumere berkisar Rp. 300 ribu-Rp.500ribu sekali jalan. Kepala Puskesmas Gunung Sari yang hadir dalam kunjungan itu mengatakan, petugas kesehatan bernama Rafik sudah ditugaskan menempati poskesdes itu. Dia mengaku baru tahu kalau selama ini petugas tidak melaksanakan tugas di Poskesdes Nanga. Bupati Ansar langsung memerintahkan Kepala Puskesmas Gunung Sari dan Dinas Kesehatan Sikka segera membuat surat agar Rafik bertemu Bupati Sikka dan harus melaksanakan tugas di Poskesdes Nanga. Pantauan Pos Kupang, Poskesdes Nanga dibangun di tengah pemukiman warga. Bertembok putih dan di sekeliling penuh rumput dan pohon liar. Poskesdes tersebut tampak sunyi seperti bangunan tak bertuan.

#### **7. Masyarakat Gurung Minta Pustu**

Pos Kupang: Senin, 19 Mei 2014 (halaman 22)

Para tokoh adat dan masyarakat Kampung Gurung, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung itu. permintaan ini disampaikan salah satu tokoh adat Gurung, Nilus Murung, ketika ditemui Pos Kupang di Kampung Sita, Sabtu (10/5). Dikatakannya, permintaan itu dilakukan karena masyarakat kampung itu merindukan pelayanan kesehatan yang maksimal. Masyarakat menginginkan pustu berada dekat dengan perkampungan warga. Selama ini, kata Murung, masyarakat harus berjalan kaki menuju Puskesmas Sita yang jaraknya hampir 5 km. Apalagi alat transportasi menuju kampung tersebut sangat susah. Murung mengatakan, masyarakat Kampung Gurung sudah bermusyawarah untuk menyerahkan lahan secara hibah kepada pemerintah asalkan pemerintah daerah membangun pustu di kampung itu.

#### **8. Pasien Beli Obat di Apotek Swasta**

Timor Express: Selasa, 20 Mei 2014 (halaman 15)

Banyak pasien RSUD Larantuka mengeluh. Mereka menyebut, sejumlah dokter di RSUD Larantuka sering memberi resep yang mengharuskan mereka membeli obat di apotek swasta di luar RSUD Larantuka. Meski sudah bayar dan memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga masih harus mengeluarkan biaya jika berobat. Diduga, apotek yang menjadi rujukan resep merupakan apotek milik dokter tertentu. Direktur RSUD Larantuka, Eman Lewar ketika dihubungi Timor Express, Senin (19/5) tidak membantah hal itu. Dijelaskan, ketersediaan obat di RSUD Larantuka sesuai dengan sejumlah standar. Diantaranya, sepuluh pola penyakit terbesar yang biasanya ditangani di RSUD Larantuka, ketersediaan keuangan daerah dan standar WHO. Ia menyebutkan, resep dokter dibuat atas kesepakatan bersama pasien. Pemberian resep tersebut, jika pasien bersangkutan melakukan pengobatan lanjutan. "Kalau pertama kali berobat resepnya obat generik yang tersedia di apotek rumah sakit. Tapi kalau kedua ketiga kali dokter resepkan obat paten yang lebih tinggi daripada saat opname pertama atau sebelum rujukan dari puskesmas," katanya. Pemberian resep, lanjut Eman, tidak melakukan secara serta merta. Biasanya, resep mengkombinasikan obat yang disiapkan rumah sakit dengan obat paten. Resep untuk apotek luar rumah sakit, umumnya adalah obat antibiotik. "Saya bertemu dokter, mereka menjelaskan bahwa pada prinsipnya resep itu diberikan supaya pasien lebih cepat sembuh," terang Eman. Sementara terkait klaim BPJS, ia mengatakan, klaim hanya dilakukan atas obat-obat yang tersedia di RSUD. Ditanya apakah rumah sakit juga mengganti biaya yang dikeluarkan pasien untuk membeli obat diluar rumah sakit, ia menyebut, pemda tidak menyiapkan dana. "Dana tidak ada untuk pengembalian seperti itu," katanya.

## 9. Pasien Poli Penyakit Dalam Membludak

Timor Express: Senin, 19 Mei 2014 (halaman 11)

Jumlah kunjungan pasien di poli penyakit dalam, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, kian meningkat. Bahkan pasien harus menunggu giliran pemeriksaan hingga pukul 13.30 wita, untuk giliran dilayani dokter penyakit dalam. Sisilia salah seorang keluarga pasien penyakit dalam, yang ditemui Timor Express, Rabu (14/5) pekan lalu mengatakan, dirinya rela menunggu dari pagi hingga siang, untuk mendapat layanan pemeriksaan dari dokter. "Waktu tunggu lama, semua pasien bisa dilayani dengan baik. Sebelumnya, karena kami datang terlambat ke poli penyakit dalam, kami bawa pulang pasien ke rumah, orang yang mau periksa banyak sekali. Jadi kita harus cepat," katanya. Sebagai keluarga pasien, Sisilia mengharapkan dokter ahli penyakit dalam, harus lebih dari tiga orang yang bertugas di poli, untuk melayani pemeriksaan kesehatan pasien. "Karena menunggu terlalu lama, manajemen RSUD Kupang harus tambah dokter ahli penyakit dalam lebih dari tiga orang," pintanya. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, dr.Mina Sukarsi yang ditemui wartawan di RSUD Prof.W.Z. Johannes Kupang, Jumat (16/5) membenarkan adanya peningkatan pasien di poli penyakit dalam. Disebutkan, hal itu terjadi akibat pasien tidak memanfaatkan hari Jumat dan Sabtu, yang kurang pasien. Pada umumnya pasien menunggu hingga Senin, sehingga jumlahnya cukup banyak. Menyoal jumlah dokter ahli yang dinilai kurang, Sukarsi mengemukakan, jumlah dokter ahli penyakit dalam yang bertugas di poli sebanyak tiga orang dalam setiap harinya. Bahkan dokter ahli penyakit dalam jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan ahli penyakit lain yang bertugas di rumah sakit ini. "Jumlah dokter penyakit dalam lebih banyak dari dokter lainnya. Kami sarankan keluarga dan pasien gunakan waktu senggang seperti Jumat dan Sabtu, untuk datang periksa. Jangan tunggu sampai hari senin, dan pastinya akan padat," pungkasnya.

## 10. Sampah Kotori RSUD Kota

Victory News: Kamis, 22 Mei 2014 (halaman 7)

Sampah mengotori wajah Kota Kupang, tidak terkecuali di RSUD Kota Kupang yang mestinya selalu terjaga kebersihannya. Disaksikan VN saat mendatangi rumah sakit yang berlokasi di Kelurahan Pasir Panjang itu, Rabu (21/5) pagi, sampah mengotori kawasan di antara bangunan berlantai dua itu. pantauan VN, pada samping kiri ruangan unit gawat darurat (UGD), pipa pembuangan limbah menuju penampung dalam kondisi pecah sehingga membentuk genangan air. Sementara sampah berupa bungkus rokok, bungkus makanan, botol kemasan air, dan berbagai sampah plastik mengotori halaman. Pemandangan paling mengerikan, bagian belakang lobi ruangan perinatologi, ICU, dan kamar operasi. Di sana terdapat beragam sampah menumpuk dan membusuk. Diantaranya pembalut, pampers, dan sisa-sisa makanan.



Rupanya orang-orang yang membuang sampah tak perlu jauh-jauh mencari tong sampah tetapi hanya dengan membuka jendela, sampah dibuang sehingga tembok belakang gedung pun dikotori. Dari kejauhan, tampak seorang pemuda membuang bungkus makanan ke halaman. Saat didekati, pemuda yang mengaku bernama Jefri itu dengan malu-malu berkata, “Petugas sonde lihat kaka. Beta buang di situ ju son apa-apa.” Andrean, salah seorang pengunjung lainnya mengaku terganggu dengan kondisi rumah sakit yang dikotori sampah. Rumah sakit, kata Andrean, mestinya selalu terjaga kebersihannya karena lingkungan kotor menjadi sumber penyakit. Sementara orang yang datang ke rumah sakit yang membutuhkan penyembuhan. “Bagaimana bisa sembuh jika rumah sakitnya kotor? Pasien butuh perawatan di lingkungan yang bersih,” ujarnya. Direktur RSUD Kota dr. Marsiana Y. Halek mengaku sudah berusaha maksimal untuk menangani masalah sampah di lingkungan kerjanya itu. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena di sana sini masih terdapat sampah yang bertebaran. Ia menjelaskan, sampah rumah sakit terdiri atas dua jenis yakni sampah medis dan sampah umum. Sampah medis menjadi tanggung jawab RSUD tanpa melibatkan orang luar atau masyarakat umum. Yang masih sulit diatasi hingga saat ini yakni sampah umum. Sampah jenis ini tak hanya dihasilkan oleh aktivitas petugas RSUD, tetapi lebih banyak diproduksi oleh pasien dan pengunjung atau masyarakat. Selama ini, kata Marsiana, sampah-sampah tersebut selalu dibersihkan oleh cleaning service. “Selain membersihkan, manajemen RSUD juga menyediakan kotak sampah di tempat-tempat tertentu serta membuat tulisan berupa larangan membuang sampah sembarangan. Namun baru beberapa saat dibersihkan, sampah bertebaran lagi,” ujarnya.

## **PANGAN & NUTRISI**

### **1. Ekonomi Penyebab Rentan Gizi Buruk**

Pos Kupang: Rabu, 21 Mei 2014 (halaman 18)

Bayi-bayi di Desa Tekaiku, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, rentan gizi buruk karena faktor ekonomi keluarga. Ekonomi yang morat-marit mengakibatkan tidak tercapainya pemenuhan dan pengontrolan asupan makanan bayi yang tepat. Sopia Rustika, bidan desa Polindes Tekaiku, saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Senin (19/5) siang mengatakan, angka penderita gizi buruk bayi di wilayah Polindes Tekaiku dari masa ke masa terbilang sangat rentan. Meski capaian pengontrolan terhadap program penyuluhan pencegahan gizi buruk ke rumah-rumah warga selalu terlaksana dengan baik, namun karena permasalahan ekonomi keluarga salah satu penyebab gizi buruk itu selalu ada. “Banyak alasan hingga bayi-bayi tidak bersalah itu menanggung gizi buruk. Secara ekonomis, bayi itu bermula dari keluarga miskin. Keluarga hanya menjadi buruh pemetik kakao atau penenun. Penghasilan yang minim membuat konsumsi makanan gizi dilupakan. Beras, telur atau susu menjadi

barang mewah karena sehari-hari hanya makan seadanya,” ujar Sophia. Lanjut Sophia, jumlah terakhir penderita gizi buruk di Polindes Tekaiku pada bulan April mencapai 11 bayi dan sedikit mengalami penurunan di bulan Mei dengan penderita gizi buruk menjadi 8 bayi. Sophia menambahkan, melalui pendekatan yang dilakukan ke rumah-rumah warga, juga ditemui faktor hadirnya gizi buruk dimana satu kepala keluarga mempunyai anak lima hingga 10 orang. “Dengan ekonomi pas-pasan tentu sangat berat menjamin pertumbuhan anak sejalan dengan kebutuhan gizi. Selain itu, hasil perkawinan yang tidak sah dimana ibu bayi hamil dengan suami orang lain sehingga akan menghadirkan masalah yang dampaknya pada perkembangan bayi masih dalam kandungan sampai pada kehadiran bayi nantinya,” kata Sophia. Dirinya selaku bidan desa berharap akan kesadaran orang tua dalam meningkatkan pemahaman tentang pola asuh bayi yang tepat. Kiranya kesadaran bersama akan rasa memiliki dan tanggung jawab sehingga angka gizi buruk di Desa Tekaiku dapat diatasi.

## **2. Bulog Ende Tidak Beli Berani Petani**

Pos Kupang: Selasa, 20 Mei 2014 (halaman 19)

Kantor Sub Divre Perum Bolog Ende tidak membeli beras dari petani setempat. Pasalnya produksi besar di Kabupaten Ende tidak mampu memenuhi permintaan Bulog dalam jumlah banyak. Beras yang ada di Ende hanya untuk konsumsi sendiri. Kepala Kantor Perum Bolog Sub Divre, I Made Agustana mengatakan hal itu menjawab Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (14/5). Menurut Made, beras yang ada di Kabupaten Ende saat ini umumnya didatangkan dari luar daerah mengingat produksi beras di daerah tersebut sangat sedikit. Dengan demikian Bulog tidak bisa membeli beras dari para petani setempat. “Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi PNS, TNI dan Polri, Bulog mendatangkan beras dari Kantor Bulog, baik dari Makassar maupun Surabaya,” kata Made. Alasan lain, ujar Made, terkait dengan harga beras yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah menetapkan harga beras yang harus dibeli oleh Bulog Rp. 6.500 per kilogram sementara beras yang beredar di pasaran saat ini di Kabupaten Ende berkisar antara Rp. 8.500 hingga Rp. 9.500 per kilogram. “Petani tidak mungkin menjual beras dengan harga Rp. 6.500 kepada Bulog, sementara di pasaran harga beras menembus level Rp.8.500 hingga Rp. 9.500 tentu dari sisi bisnis petani merasa lebih untung menjual ke pasaran bebas dibandingkan ke Bulog,” kata Made. Tentang stok beras yang ada di gudang Bulog Ende saat ini, Made mengatakan masih mencukupi, yakni 1.300 ton bahkan stoknya akan semakin banyak karena dalam waktu dekat akan didatangkan beras dari luar daerah sebanyak 1.000 ton. Dengan kondisi stok yang ada maka diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan beras dalam daerah untuk empat bulan ke depan bahkan hingga memasuki Hari Raya Lebaran di tahun 2014.

## RISIKO

### 1. Warga Desa Ondorea Barat Minta Bronjong

Pos Kupang: Jumat, 16 Mei 2014 (halaman 19)

Warga Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, meminta pemerintah membangun bronjong di bantaran kali di desa tersebut. Pasalnya warga desa setempat kerap menjadi korban luapan air sungai ketika banjir. Kepala Desa Ondorea Barat, Rudolfus Ndate mengatakan hal itu saat berdialog dengan Bupati Ende, Ir. Marsel Petu, Selasa (12/5) di Tendarea, Kecamatan Nangapanda, se usai pelaksanaan pelantikan penjabat Kepala Desa Tandarea, Anselmus Daga. Kades Rudolfus mengatakan, luapan air dari bantaran kali yang ada di Desa Ondorea Barat seakan sudah menjadi hal yang rutinitas setiap musim hujan. Luapan banjir tidak saja merusak pemukiman warga, namun sarana umum serta berbagai hewan piaraan warga maupun kebun atau sawah juga ikut rusak serta hilang terbawa banjir. Untuk menghindari bencana yang lebih besar di kemudian hari, pihaknya berharap pemerintah segera membangun tanggul permanen di sepanjang bantaran kali di Desa Ondorea Barat. "Saya dapat pastikan bahwa setiap tahun tanah yang menjadi wilayah Ende di Desa Ondorea Barat telah habis tergerus banjir. Hal itu karena ketiadaan tanggul penahan banjir yang menjadi kewenangan Pemkab Ende," kata Rudolfus. Lanjut Rudolfus, sejak terjadi banjir besar pada tahun 2009 lalu yang menimpa Desa Ondorea Barat, pemerintah berjanji akan membangun tanggul, namun rencana itu tinggal rencana karena hingga kini belum ada tanggul yang dibangun. Menanggapi keluhan dari Kepala Desa Ondorea Barat, Bupati Ende, Ir. Marsel Petu mengatakan, apa yang dikeluhkan itu tentu akan menjadi catatan dari pemerintah sehingga di waktu mendatang pemerintah bisa membangun tanggul sesuai dengan keinginan masyarakat.

### 2. Lalu Lintas Macet 2,5 Jam. Jalan Negara Ruteng-Borong Tertutup Longsor

Pos Kupang: Jumat, 30 Mei 2014 (halaman 17)

Ruas jalan negara lintas Flores tertutup longsor di Kampung Wakas, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Rabu (28/5). Longsoran di ruas jalan itu mengakibatkan kemacetan sekitar 2,5 jam karena terjadi antrean ratusan kendaraan, baik dari arah Borong, Ibukota Kabupaten Matim maupun dari arah barat Kabupaten Manggarai. Informasi yang diperoleh Pos Kupang dari warga Desa Wakas, longsor yang menutup badan jalan itu terjadi hari Rabu (28/5). Setelah petugas menggosur material longsoran barulah kendaraan bisa melewati jalan tersebut. "Longsoran di lokasi itu sudah terjadi berulang-ulang," kata warga setempat. Pantauan Pos Kupang di lokasi longsoran, Kamis (29/5) pagi, terlihat tumpukan material bekas longsoran berupa tanah, kayu dan batu

menumpuk di kiri dan kanan jalan. Longsoran itu berasal dari tebing dengan ketinggian hampir 150 meter dan panjang longsoran sekitar 20 meter. Tampak di badan jalan sebagian material sudah digusur dengan ukuran untuk melewati satu kendaraan.

### **3. Kapal Nelayan Tenggelam di Pukuafu**

Timor Express: Jumat, 16 Mei 2014 (halaman 1)

Musibah pelayaran kembali terjadi di perairan Pukuafu, Selat Rote, Kabupaten Rote Ndao, sekira pukul 02.00 Wita, Rabu (14/5). Kali ini sebuah kapal kayu bernama 'Mitra Bahari' tenggelam setelah mengalami kebocoran. Saat tenggelam, kapal naas dengan enam anak buah kapal (ABK) itu sedang dalam pelayaran dari pelabuhan rakyat Namosain Kupang menuju Rote dengan mengangkut 75 drum bahan bakar minyak (BBM). Akibat kebocoran, kapal itu pun tenggelam pada posisi 10<sup>0</sup>22' 40,36'' S - 123<sup>0</sup>24' 09,72'' E di Selat Rote. Kepala Kantor SAR Kelas B Kupang, Gede Ardana, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya baru mendapat laporan sekira pukul 06.30 Wita dari Arnoldus Mbuik selaku nahkoda kapal tersebut. Menurut Ardana, setelah menempuh sekira tiga jam perjalanan, pada pukul 10.40 Wita, tim rescue dengan menggunakan rescue boat 308 tiba di tempat kejadian musibah. Para awak kapal dievakuasi ke Kupang dan tiba sekira pukul 12.45 Wita, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang menggunakan ambulance KKP Kupang untuk mendapat perawatan medis.

### **4. Jalan Nangapanda-Maukaro Rusak**

Pos Kupang: Jumat, 16 Mei 2014 (halaman 19)

Ruas jalan di jalur tengah yang menghubungkan antara Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, saat ini rusak. Hal ini ditandai dengan banyaknya lubang serta batu-batu lepas berbagai ukuran berhamburan di sepanjang jalan. Menurut salah seorang warga Desa Tendarea, Gaspar Gatot yang ditemui Pos Kupang di Desa Tendarea, Kamis (15/5), ruas jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Diperkirakan sekitar 10 tahun jalan tersebut rusak namun tidak digubris oleh pemerintah. Lanjut Gatot, ruas jalan itu adalah ruas jalan yang cukup strategis, karena selain menjadi penghubung antara dua kecamatan juga sepanjang jalur jalan tersebut terdapat komoditas para petani seperti kopi, cengkeh, kakao, kemiri, namun sejauh ini belum terlalu optimal dimanfaatkan, karena kondisi jalan yang rusak. "Jalur jalan Nangapanda-Maukaro menjadi jalan alternatif apabila warga hendak ke Maukaro atau lintas utara ketika ruas jalan utama rusak, namun selama ini warga terpaksa harus putar lewat Mbay-Kabupaten Nagekeo. Padahal jarak tempuh yang cukup jauh dibandingkan menggunakan jalur jalan lewat Nangapanda,

namun karena kondisi jalan rusak maka hal itu tidak bisa dilakukan,” kata Gatot. Gatot berharap pemerintah Kabupaten Ende saat ini segera memperbaiki secara total sehingga jalan yang ada bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh warga. Bupati Ende, Ir. Marsel Petu mengatakan pihaknya sudah mengetahui bahkan mengalami sendiri saat melewati jalan tersebut. Untuk itu, kata Bupati Marsel, ruas Jalan Nangapanda- Maukaro akan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera perbaiki paling lambat tahun anggaran 2015 mendatang.

## 5. Ruas Jalan Ndonga-Nuabosi Memprihatinkan

Pos Kupang: Selasa, 20 Mei 2014 (halaman 19)

Ruas jalan Ndonga-Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende memprihatinkan. Ruas jalan sudah rusak parah, banyak kerikil aspal terlepas. Longsoran batu dan pasir selalu membayangi pelintas. Karena batu dan pasir sering tumpah dan menutupi badan jalan. Disaksikan Pos Kupang, Sabtu (17/5), ruas jalan menuju sentral pertanian dan perkebunan di Kabupaten Ende, itu penuh dengan material pasir. Aspalnya banyak yang pecah tergerus aliran air sehingga menyulitkan pengendara melintas dengan aman. Belum lagi material pasir di Km 5, karena ratusan penambang lokal mengadu nasib dengan menggali dan menjual pasir serta batu. Kepala Desa Ndetundora III, Adrianus Masi dan Sekretaris Desa Ndetundora II, Geby Roga kepada Pos Kupang, Sabtu (17/5), secara terpisah mengungkapkan keprihatinan terkait kondisi jalan. “Memang memprihatinkan. Jalan ini sudah lama rusak. Potensi kita cukup diandalkan di sini,” tutur Masi kepada Pos Kupang di kediamannya, Sabtu (17/5). Diharapkan perbaikan ruas jalan Ndonga-Nuabosi menjadi perhatian pembangunan oleh pemerintah daerah.

## AIR

### 1. Debit Air di Magepanda Menurun Drastis

Victory News: Kamis, 22 Mei 2014 (halaman 14)

Memasuki bulan Mei debit air di Desa Magepanda, Kabupaten Sikka yang selama ini menjadi lumbung beras, menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengolah lahan persawahan warga terpaksa mengoperasikan sejumlah 524 unit mesin sedot air untuk mengairi tanaman mereka. Demikian disampaikan Kepala Desa Magepanda Petrus Date kepada VN di sela acara pembukaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Magepanda, Rabu (21/5) kemarin. “Dari tahun ke tahun debit air di Magepanda semakin menurun. Baru bulan Mei sudah kering semua, sehingga terpaksa petani menggunakan mesin sedot air untuk mengairi persawahan milik mereka,” kata Petrus Date. Ia menyampaikan, debit air di

bendungan dari tahun ke tahun semakin menurun sehingga para petani terpaksa menggunakan mesin sedot air. Dengan petani beramai-ramai menggunakan mesin sedot air, kata Petrus Date, membuat air tanah semakin terkuras. “Dengan mesin sedot air ini juga membuat air tanah semakin terkuras, terbukti bahwa kalau gunakan mesin yang hanya kedalaman 12 meter, airnya kecil sekali bahkan ada tempat yang tidak dapat air pada kedalaman 12 meter,” kata Date. Lebih jauh, Petrus Date menyampaikan, dengan masyarakat menggunakan mesin sedot air, akan mempengaruhi jumlah pendapatan masyarakat karena biaya operasional mesin sedot air itu sangat mahal.

## **2. PDAM Kota Ancam Bongkar Pipa di Tamnos**

Victory News: Rabu, 28 Mei 2014 (halaman 7)

Direktur PDAM Kota Kupang Noldi Mumu mengancam akan membongkar pipa jaringan air minum milik PDAM Kabupaten Kupang di Taman Nostalgia (Tamnos). Hal itu dikatakannya ketika Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johannes Otemoesoe mengatakan jaringan perpipaan tersebut bukan milik PDAM Kabupaten, melainkan milik PDAM Kota. “Kalau dia bilang bukan pipa PDAM Kabupaten, hari ini saya suruh petugas kami bongkar saja,” tulis Noldi melalui pesan singkatnya kepada VN, Selasa (27/5) malam. Ia juga mengatakan, Direktur PDAM Kabupaten Kupang tidak mengerti jaringan perpipaan di Tamnos, kata dia, merupakan jaringan milik PDAM Kabupaten. Ia juga mengaku telah berulang kali menyampaikan kebocoran pipa tersebut kepada PDAM Kabupaten namun tidak ditanggapi. Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johannes Otemoesoe mengatakan, setelah dicek oleh stafnya, ternyata pipa bocor di kompleks Tamnos merupakan jaringan perpipaan milik PDAM Kota Kupang. Sedangkan pipa yang bocor di bawah Jalan Frans Seda, persisnya di seberang jalan depan Mapolresta merupakan pipa milik PDAM Kabupaten Kupang. Khusus kebocoran di depan Mapolresta, kata Johannes, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk membelah jalan negara di atasnya. Pantauan VN, sejak Senin (26/5) sore pipa air di tepi jalan masuk bagian timur Taman Nostalgia (Tamnos) Kupang bocor. Bocoran terjadi pada sambungan pipa sekitar lima meter dari bak penampung. Tampak sambungan ditutup menggunakan pecahan tehel untuk mengatasi cipratan air sampai ke jalan. Tak jauh dari Tamnos, di Jalan Frans Seda, tepatnya di seberang jalan depan Mapolresta terdapat kebocoran pipa. Rembesan air membasahi jalan, membuat jalan itu licin.

### 3. **Warga Tabolang Konsumsi Air Hujan**

Victory News: Sabtu, 31 Mei 2014 (halaman 13)

Warga Tabolang di Desa Lawahing Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor sampai saat ini belum menikmati air minum yang layak dikonsumsi. Untuk keperluan sehari-hari, warga setempat masih mengandalkan sumber air dari bak penampungan air hujan (PAH). Umumnya di setiap rumah warga dibangun bak untuk menampung air hujan. Pasalnya, letak wilayah yang berada di atas ketinggian membuat warga kesulitan untuk memperoleh sumber mata air. PAH tersebut untuk menampung air hujan yang dikonsumsi selama satu tahun. "Jadi kalau musim hujan itu kami tampung air di bak sampai penuh. Air ini kami gunakan untuk keperluan kami sehari-hari. Bak ini dibangun dari bantuan pemerintah, hampir setiap rumah ada bak," ujar salah seorang warga Tabola Ruben Oualeng, kepada VN, Jumat (30/5). Ia mengatakan, di wilayah itu ada sumber mata air, namun debitnya sangat kecil, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan warga, bahkan untuk mendapatkan air harus menunggu berjam-jam. Warga lainnya, Mika Lobang mengatakan, kesulitan mendapatkan air bersih ini sudah diketahui para pejabat Pemda dan DPRD Alor. Namun sayang, hingga kini tidak ada perhatian untuk dicari solusi membantu warga Tabolang.

### 4. **Tiga Desa di Kangae Kesulitan Air Bersih**

Pos Kupang: Sabtu, 17 Mei 2014 (halaman 18)

Sejumlah desa di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Masyarakat tiga dusun di Desa Tekaiku bahkan harus mengkonsumsi air yang bersumber dari kerukan batang pisang. Sekdes Tekaiku, Maria Nona Firgi saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Jumat (16/5) siang, mengatakan di saat musim kemarau ada beberapa desa di Kecamatan Kangae, yakni Desa Mekendetung, Blatatatin dan Tekaiku sangat kesulitan air bersih. Menurutnya selama ini warga hanya mengandalkan air hujan dan tidak satupun sumber mata air yang ada di wilayah mereka. Lanjutnya, hanya bermodalkan air hujan sebagai sumber mata air, membuat tiga dusun, yakni Dusun Hubinkloang, Hubinnatar dan Wolomude di saat musim kemarau seperti ini harus mencari cara untuk mendapatkan air bersih. "Tiga dusun tersebut disaat musim hujan baru ada air, kalau musim begini jangankan untuk mandi atau mencuci untuk minum saja susah sekali. Dan, bagi warga yang memiliki bak penampung, pasti memesan air tangki dengan kisaran harga Rp. 150.000 - Rp. 250.000, namun karena medan dan jarak membuat akses ke dusun-dusun kadang sangat sulit dijangkau dan warga juga tidak semua memiliki bak penampung sehingga kondisi tersebut benar-benar memprihatinkan," kata Maria.

## 5. **Warga Dobo Konsumsi Air Hujan**

Pos Kupang: Sabtu, 24 Mei 2014 (halaman 18)

Warga Dusun Riipua, Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama ini mereka hanya mengkonsumsi air hujan. Bibiana Nona Atfenti (38), warga Dusun Riipua, saat ditemui Pos Kupang di kediamannya, Jumat (23/5) siang, menuturkan, warga Desa Dobo saat ini sangat kesulitan air bersih. Menurutnya, selama ini warga hanya mengandalkan tampungan air yang bersumber dari air hujan. Kini sudah memasuki musim kemarau, persediaan air tak cukup hingga musim hujan berikutnya. Menurut Bibiana, warga yang memiliki bak penampungan air terpaksa memesan air tangki dari Kota Maumere dengan harga Rp. 300.000 per tangki. Air tangki tersebut setidaknya dapat membantu persediaan air untuk satu bulan ke depan. "Warga bersedia mengumpulkan dana atau iuran kalau ada perusahaan air minum yang mau menoleh ke sini. Kami sangat kesusahan air untuk kehidupan sehari-hari," tegas Gerdedius, warga Desa Dobo.

## 6. **PDAM Cabut Meteran Air SMK 2 Soe**

Victory News: Sabtu, 17 Mei 2014 (halaman 12)

Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten TTS mencabut meteran air di SMK Negeri 2 Soe karena menunggak pembayaran rekening air sejak Januari. Informasi itu disampaikan Bernabas Naitboho, salah seorang guru di sekolah tersebut, Jumat kemarin di kantor DPRD TTS. Dikatakan Nabas, meteran dibongkar petugas PDAM TTS pada Selasa (13/5) sekitar pukul 10.00 Wita. Pihak sekolah tidak melawan saat pembongkaran terjadi. "Bilangnya tunggak Rp 4juta lebih dari Januari, herannya kok tidak bisa dibayar padahal ada anggarannya di sekolah, yang bayar itu biasanya pegawai di bagian tata usaha," kata Naitboho. Kepala SMK Negeri 2 Soe Johanis Missa yang dikonfirmasi per telepon membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya belum melunasi rekening air sejak Januari. Hal itu terjadi karena dana BOS untuk sekolah tersebut belum dicairkan. Dana BOS biasa dipakai untuk pembayaran rekening air. "Kami relakan saja (pencabutan meteran air) karena memang belum bayar. Kami biasa bayar pakai dana BOS tapi dana BOS belum cair," kata Missa lewat telepon. Missa mempertanyakan kinerja PDAM TTS yang terkesan hanya memperhatikan keuntungan tapi kurang mempedulikan pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan. "Kami akan lunasi tapi tolong jangan hanya kejar pendapatan saja tapi tidak perhatikan pelayanan, air jalan tidak lancar tapi tagihan naik terus. Biasanya kami bayar hanya Rp 200 ribu tapi mulai Januari sampai Rp 1 juta," katanya. Direktur PDAM TTS Jan Nenotek mengatakan, sebelum pencabutan pihaknya sudah mengirimkan peringatan dan pemberitahuan kepada pihak sekolah soal adanya tunggakan yang akan berbuntut pada pencabutan meteran namun pihak



sekolah tidak menanggapi penyampaian pihak PDAM tersebut. Dikatakannya, SMK Negeri 2 Soe mulai tunggak pembayaran sejak Desember 2013 dan peringatan mulai disampaikan tiga bulan berturut-turut sejak Januari hingga diputuskan awal pekan ini.

## 7. Rujab DPRD Kota Tunggak Bayar Air

Victory News: Sabtu, 24 Mei 2014 (halaman 1)

Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang mengancam akan memutus aliran air ke rumah jabatan (Rujab) para pimpinan DPRD Kota Kupang karena menunggak membayar rekening air mencapai ratusan juta rupiah. Selain Rujab, beberapa SKPD seperti Dinas Kebersihan dan Tata Kota serta kantor Lurah Alak, juga terancam diputus meteran airnya oleh PDAM Kota. “Kalau dalam minggu ini belum bayar juga, maka terpaksa air kami putuskan saja,” tegas Direktur PDAM Kota Kupang Noldi Mumu kepada VN, Jumat (23/5). Sekretaris DPRD Kota Kupang Adrianus Lusi yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin, mengatakan, rekening air Rujab pimpinan Dewan menjadi tanggung jawab Dewan Kota. Dia mengakui adanya tunggakan rekening air tersebut sejak 2010-2013. “Itu sebelum saya menjabat Sekwan,” katanya. Dia menambahkan, tunggakan yang ada memang harus dibayar, namun masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. Jika dari hasil pemeriksaan direkomendasikan untuk dibayar, maka dalam APBD perubahan akan dialokasikan dana untuk membayar tunggakan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp. 64 juta.

## Tentang Penerbit

Penerbitan NTT Research Focus adalah bagian dari pengembangan NTT Studies oleh IRGSC, sebuah think tank yang berbasis di Kupang, NTT.

Koordinator pelaksana : Inriyani Takesan  
Penanggung Jawab : Dominggus Elcid Li, PhD  
Editor : Dr. Jonatan A. Lassa  
Asisten pelaksana : Nike Frans, Randy Banunaek  
Reviewer : John Talan